

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBINA PENGEMIS
DAN GELANDANGAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Bidang Ilmu Sosial program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Hafiz Saputra Hasan
NPM : 167310491**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

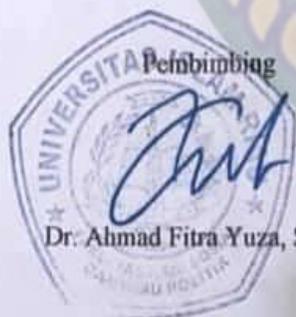
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hafiz Saputra Hasan
NPM : 167310491
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan Kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Dr. Ranggi Ade Febrian. S.IP. M.Si

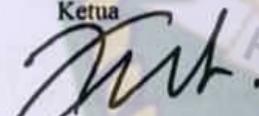
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hafiz Saputra Hasan
NPM : 167310491
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan di Kota Pekanbaru

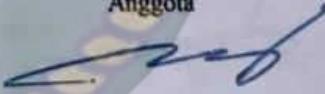
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 31 Maret 2021

Ketua

Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA

Sekretaris

Andriyus, S.Sos., M.Si
Anggota


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si

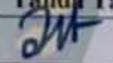
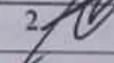
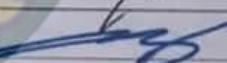
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 10 Februari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 Februari 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hafiz Saputra Hasan
NPM : 167310491
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru**

Nilai Ujian : Angka : " 81,9 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 11 Februari 2021

An: Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan / Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

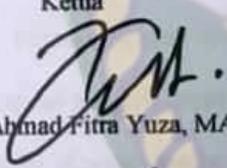
Nama : Hafiz Saputra Hasan
NPM : 167310491
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan
Gelandangan di Kota Pekanbaru

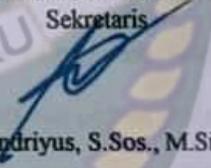
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukkan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 31 Maret 2021

Ketua

Sekretaris


Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA


Andriyus, S.Sos., M.Si

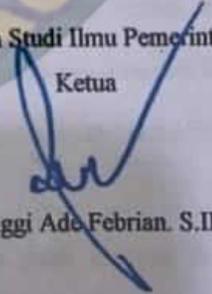
Turut menyetujui,

Wakil Dekan / Bid. Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan Kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Adapun Skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan di Kota Pekanbaru”**. ini penulis diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu Syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu dibidang ilmu sosial dan politik program studi Ilmu Pemerintah pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas walau pun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan Skripsi ini banyak pihak turut Membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis salut dan terima kasih dan terimah kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi SH, MCL yang menyediakan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
2. Dekan Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan kepada penulis, serta kesempatan untuk menambah ilmu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang beliau pimpin.
3. Ketua Progam studi Ilmu pemerintahan Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian., M.Si, yang telah memberikan beberapa masukan bagi perkembangan Skripsi ini
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.Si, selaku pembimbing yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan selalu mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi dan sebagai motivator untuk menyelesaikan masa studi
5. Seluruh dosen dan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
6. Orang tua tercinta yakni Ayahanda dan Ibunda yang selalu mensuport penulis dan membantu dalam segi materi maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan penelitian

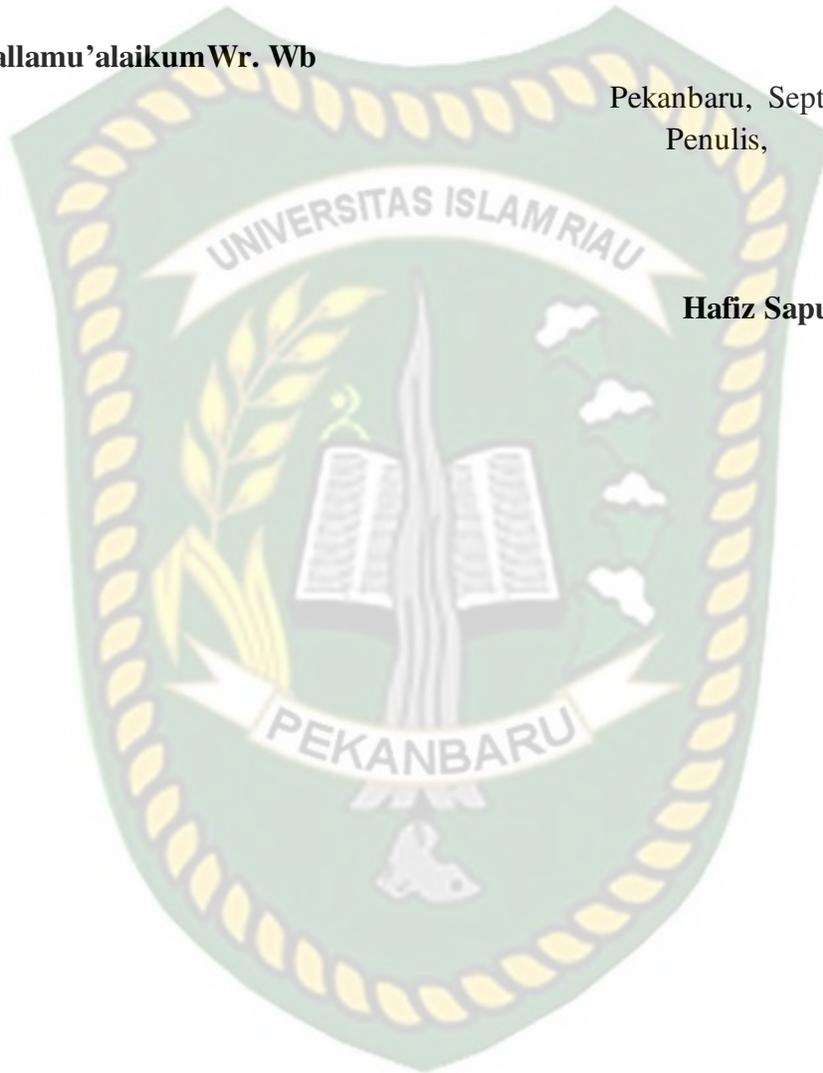
Insyallah atas kebaikan, motivasi dan saran serta dukungan dengan mulia yang pernah diberikan Insyallah akan menerima balasan dan pahala dari-Nya. Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, September 2020

Penulis,

Hafiz Saputra Hasan



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	15
1. Teori Negara dan Tujuan Negara	15
2. Teori Pemerintah	17
3. Teori Pemerintahan	19
4. Teori Ilmu Pemerintahan	21
5. Konsep Kebijakan Publik	23
6. Teori Peranan	24
7. Teori Pembinaan	27
8. Gelandangan dan pengemis	30
B. Penelitian Terdahulu	31

C. Kerangka Pemikiran	32
D. Konsep Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan	38
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru	42
B. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	45
C. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pekanbaru	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Identitas Informan Penelitian	52
B. Hasil dan Pembahasan	54
1. Perencanaan	55
2. Pemberian Bimbingan	59
3. Memberikan Pengarahan	63
4. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan	68
C. Faktor Penghambat Pembinaan Pengemis dan Gelandangan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	75
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Razia dan Pembinaan Pengemis dan Gelandangan Tahun 2017-2020	10
I.2. Jumlah Gepeng yang teerjaring dan di pulangkan selama 2017-2019 ...	10
II.1. Penelitian terdahulu yang relevan	32
III.1. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian	41
V.1. Distribusi informan penelitian berdasarkan Jenis Kelamin	53
V.2. Distribusi informan penelitian Berdasarkan Umur	53
V.3. Distribusi informan penelitian berdasarkan Tingkatan Pendidikan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis dan Gelandangan Di kota Pekanbaru	33
IV.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru	45



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafiz Saputra Hasan
NPM : 167310491
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2020
Pelaku Pernyataan

Hafiz Saputra Hasan

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBINA PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Oleh

Hafiz Saputra Hasan

Permasalahan kesejahteraan sosial sudah lama terjadi dan menjadi pekerjaan pemerintah dari waktu ke waktu, kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek dalam tujuan negara, bagaimana pemerintah dapat mencapai kondisi tersebut dengan melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan, khususnya di Kota Pekanbaru permasalahan kesejahteraan sosial khususnya pengemis dan gelandangan merupakan hal yang tidak baru lagi, jumlah pengemis dan gelandangan yang meningkat dari tahun ketahun sehingga pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial diharuskan melakukan tindakan preventif atau pembinaan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru. penelitian ini menggunakan teori pembinaan menurut Santoso yaitu perencanaan, pembinaan, pengarahan dan pelatihan. Tipe penelitian ini ialah kualitatif deskripti, dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul datanya, setelah melakukan penelitian, pengumpulan dan analisis data maka dapat disimpulkan peran Dinas Sosial Pekanbaru dalam perencanaan, pembimbingan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan peraturan serta visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka dapat diketahui dari pelaksanaan peran Dinas Sosial dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun beberapa faktor penghambat ialah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran program pembinaan dan kurangnya kesadaran pengemis dan gelandangan yang telah dibina dan kembali lagi kejalan.

Kata Kunci: Peran, pembinaan, Sosial, gelandangan, pengemis

THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN DEVELOPING PENGEMIS AND INDEPENDENT IN PEKANBARU CITY

Abstract

By

Hafiz Saputra Hasan

Social welfare problems have long been occurring and have become the work of the government from time to time, social welfare is one aspect of the country's goals, how the government can achieve this condition by carrying out its service and empowerment functions, especially in Pekanbaru City, the problem of social welfare, especially beggars and homeless people. which is not new anymore, the number of beggars and homeless people is increasing from year to year so that the Pekanbaru City government through the Social Service is required to take preventive or coaching actions, therefore the authors are interested in conducting research on the Role of Social Services in Fostering Beggars and Homeless in Pekanbaru City. This study uses the coaching theory according to Santoso, namely planning, coaching, directing and training. This type of research is descriptive qualitative, with interviews and observations as data collection tools, after conducting research, data collection and analysis, it can be concluded that the role of the Pekanbaru Social Service in planning, guiding, directing, education and training is in accordance with the regulations as well as the vision and mission of Pekanbaru City Social Service, namely the realization of social welfare for people with social welfare problems, it can be seen from the implementation of the role of the Social Service and fostering homeless people and beggars in Pekanbaru City that has been going quite well. Some of the inhibiting factors are a lack of human resources, a lack of budget for guidance programs and a lack of awareness of beggars and homeless people who have been fostered and are returning to the road.

Keywords: *Role, coaching, social, homeless, beggars*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan mempunyai cita-cita untuk menjadikan masyarakat juga pemerintahan suatu negara menjadi lebih baik dari sebelumnya, pembangunan dapat dilakukan dari berbagai aspek seperti kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan sosial. Pembangunan suatu negara tentunya secara umum direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mana bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan masyarakat yang salah satunya sangat kompleks yaitu kesejahteraan. Permasalahan kesejahteraan tentunya mengenai banyak aspek seperti ekonomi masyarakat, pendidikan anak, kesehatan keluarga serta pelayanan sosial secara menyeluruh. Maka dari itu salah satu pelaksanaan tugas pemerintah yaitu agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh dan mengusahakan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram serta berfungsi secara sosial dengan sebagai mana mestinya, baik individu maupun kelompok.

Kompleksitas permasalahan dalam masyarakat tentunya akan mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang mana akan timbulnya masalah-masalah baru dalam kehidupan sosial, yang mana salah satunya ialah permasalahan kemiskinan. Maka dari itu pemerintah sebagai pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjamin bahwa kehidupan masyarakat dapat lebih baik dalam melakukan pelayanan, pemberdayaan serta pembangunan selalu kearah kesejahteraan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah yang memang telah ada lama sebelum negara Indonesia terbentuk sehingga masalah ini bukan masalah baru. Banyaknya penelitian dilakukan demi mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan dan beberapa solusi-solusi dalam penanganannya, tetapi dalam implementasinya belum dapat terlaksana dengan baik. Kemiskinan dominan terjadi di perkotaan hal ini salah satunya terjadi dikarenakan dampak dari pembangunan. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pembangunan yang mana kearah yang lebih baik, tetapi dampak dari pembangunan sendiri malah menimbulkan kemiskinan.

Seperti diketahui setiap daerah tentunya menginginkan pembangunan baik itu fisik maupun ekonomi serta sosial dan yang mana diharapkan hasil pembangunan yang dilakukan dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat umum tanpa terkecuali, tetapi kondisi itu terlihat kontradiktif dengan pembangunan yang ada di kota, yang mana kota di haruskan mampu untuk melakukan pembangunan dengan tujuan melengkapi sarana dan prasana kota menjadi lebih memadai. Tetapi dampak yang terjadi dari pembangunan tersebut yaitu memarginalkan beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pendidikan rendah. Maka dari itu terdapat dampak negatif dari pembangunan perkotaan dibandingkan dengan daerah-daerah perdesaan. Pembangunan kota dengan segala bentuk keindahannya, kelengkapan fasilitas dan ekonominya menjadikan daya tarik bagi masyarakat di daerah untuk pindah dan mencari pekerjaan di kota atau dikenal dengan urbanisasi.

Urbanisasi tanpa dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia tentunya akan menjadikan mereka terjerumus kedalam kehidupan marginal. Tidak adanya pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki kemampuan akan

sangat sulit untuk mencari pekerjaan di perkotaan. Kemudian persaingan antar individu yang tinggi dan akan membawa mereka kepada garis kemiskinan. Berbagai faktor tersebut ialah faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan, selain itu terdapat faktor internal yang mengakibatkan kemiskinan, antara lain:

1. Rendahnya keterampilan
2. Rendahnya pendidikan,
3. Rendahnya kemauan untuk berkembang, dan
4. Rendahnya motivasi hidup

Pemberdayaan secara teoritis sangat tergantung kepada dua aspek yaitu kekuatan intervensi dari eksternal dan kekuatan internal. Tetapi seperti diketahui bahwa banyaknya program dan model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dominan pada kebijakan bantuan (lahan, dana dan sarana). Sehingga yang perlu dilakukan ialah bagaimana pemerintah dapat memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan kondisi masyarakat, bukan pada memberdayakan masyarakat miskin. Model pemberdayaan seperti itu tentunya akan berdampak pada ketergantungan masyarakat bukan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan yang sampai saat ini dirasa mampu memberikan kontribusi baik jangka pendek maupun panjang ialah dengan pembelajaran dan pendekatan secara partisipatif pada kelompok masyarakat yang dilakukan secara kontinu. Sistem dan pola seperti ini karena dapat meningkatkan potensi masyarakat secara berkesinambungan dan tentunya masyarakat akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan skill mereka sendiri. Berbeda dengan pandangan bahwa pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat umum, salah satunya pengemis, karena keberadaan pengemis khususnya di kota-kota besar sangatlah

banyak dan telah membentuk komunitas, di karenakan banyak asumsi bahwa menjadi pengemis mendapatkan penghasilan yang cukup besar dibandingkan dengan pekerja umumnya.

Keberadaan pengemis sebagai salah satu hal yang sudah biasa khususnya di perkotaan dan telah menjadi masalah yang ada dibanyak kota seluruh indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Keberadaan gelandangan dan pengemis di teras dan lorong pertokoan pasar, di jalan raya lampu merah meminta dengan belas keasihan, banyak cara dan modus yang mereka perbuat untuk terlihat kesusahan seperti membawa anak-anak, berpakaian lusuh kemudian mengatas namakan yayasan panti asuhan dengan harapan pengendara di jalan raya dan masyarakat yang melihatnya mejadi kasihan dan memberikan uang kepada mereka.

Permasalahan mengenai kondisi dan ketertiban sosial khususnya tuna sosial seperti pengemis dan gelandangan ialah menjadi tanggungjawab Pemda Pekanbaru khususnya Dinas Sosial. Pekanbaru merupakan Ibu Kota Kabupaten dan dengan perkembangan ekonomi yang sehingga menjadi kota tujuan urbanisasi dari beberapa kabupaten dan provinsi di Pulau Sumatera jumlah kedatangan dan keberadaan pengemis di Kota Pekanbaru semakin tahun semakin bertambah yang mana semakin meresahkan masyarakat secara umum dan pengendara dan pengguna jalan secara khusus, dikarenakan pengemis dan gelandangan tersebut melakukan aksi minta-minta di jalan, simpang tiga, simpang empat lampu merah pusat kota.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi maka daerah di berikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan aspirasi msyarakat. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana urusan konkruen

sebagai urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dengan daerah, dimana pada pasal 12 di sebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Bidang sosial merupakan salah satu urusan konkrue pemerintah daerah yaitu urusan pemerintah wajib pemerintah daerah khususnya berkenaan dengan pelayanan. Bidang sosial ini merupakan urusan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan kehidupan sosial seperti pedagang, pengemis, gelandangan, maka dari itu pemerintah daerah khususnya Pekanbaru diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan baik dengan cara penanganan preventif maupun represif.

Untuk mengatur permasalahan sosial pemerintah daerah Kota Pekanbaru merancang dan memutuskan suatu kebijakan mengenai ketertiban sosial yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, berkenaan dengan tindakan mengemis diatur dalam ketentuan larangan yaitu pasal 3 yang berisi “Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan” dan aturan tentang larangan masyarakat memberi sumbangan atau uang kepada gelandangan dan pengemis yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, yang berisi “Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan

lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.” Maksud dari ketentuan ini ialah mencegah keberadaan pengemis dan gelandangan pada tempat-tempat umum, apabila mereka diberikan uang atau barang pada persimpangan jalan-jalan di kota, lampu merah, jalur hijau dan JPO (jembatan penyeberangan orang), jika masyarakat tetap memberikan mereka uang maka mereka akan tetap disitu dan mengganggu ketertiban dan ketentraman fasilitas umum.

Keberadaan pengemis dan gelandangan khususnya di Kota Pekanbaru adalah permasalahan yang mendesak, sebagaimana terlihat bahwa jumlah pengemis dan gelandangan pada pertokoan, jalan raya serta fasilitas umum seperti taman, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Pekanbaru belum secara tegas menerapkan sanksi terhadap pengemis dan gelandangan yang berkeliaran dan juga yang terjaring razia, sehingga tidak ada efek jera dari mereka untuk tidak kembali mengemis. Maka dari itu dapat diketahui implementasi perda mengenai ketertiban sosial belum sepenuhnya di laksanakan dengan optimal.

Untuk lebih menjelaskan ketegasan pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam permasalahan pengemis ini di jelaskan bahwa pada perda nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terdapat pasal 29 mengatur pemberian sanksi kepada gelandangan dan pengemis serta masyarakat yang melanggar ketentuan dari pasal 3 dan 1, yaitu “barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 peraturan daerah ini dicancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah). Tetapi dalam kenyataannya belum dapat di jalankan dengan optimal melihat bahwa pemberian suatu barang dalam bentuk uang dan benda kepada

pengemis dan gelandangan ialah hak masyarakat yang terkadang memang sebab kasihan, tetapi hal tersebutlah yang menjadikan keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru menjadi semakin berkembang, tindakan sanksi yang di jelaskan di atas tidak dapat di terapkan sanksi seperti diatas, maka dari itu perlu melainkan tindakan penjaringan, pemulangan atau pembinaan serta peningkatan kemampuan.

Pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu cara memandang bahwa semua masyarakat tidak terkecuali gelandangan ataupun pengemis yang di bina oleh pemerintah daerah dimana di dalamnya terdapat dasar-dasar seperti keadilan dan ketertiban untuk semua masyarakat negara Indonesia yang merupakan nilai-nilai pancasila dan UUD. Maka dari itu sangat perlu sebuah tindakan yang lebih nyata dalam penyelesaian masalah kenteraman dan ketertiban ini yaitu dengan melakukan pembinaan kepada pengemis, agar gelandangan dan pengemis yang dibina dapat hidup lebih baik dan bergabung menjadi warga Kota Pekanbaru yang bermatabat.

Pada kenyataannya pelaksanaan penindakan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru melalui instansi terkait yaitu Dinas Sosial dalam pelaksanaannya belum bisa menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru. Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan para pengemis dan gelandangan dengan harapan dapat memberikan kesadaran bagi mereka, tetapi setelah dilakukan penjaringan dan pembinaan awal dari Dinsos Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja terlihat masih banyak pengemis dan gelandangan yang kembali ke jalan raya dan melakukan aktivitas meminta ditempat umum.

Dari beberapa penjelasan mengenai kewajiban pemerintah daerah bidang sosial dan perumusan peraturan daerah Kota Pekanbaru mengenai ketertiban sosial diketahui bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab serta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketertiban sosial dengan melakukan pembinaan terhadap pegemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 yaitu “Pemerintah daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan ketrampilan (*workshop*) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis’. Maka dari implementasi kebijakan tersebut menjadi dasar dari pihak Dinas Sosial untuk melakukan rehabilitasi, pemberian keterampilan dan bimbingan kepada pengemis dan gelandangan dan hasilnya pengemis dan gelandangan tidak kembali lagi hidup sebagai tuna sosial di jalanan serta diharapkan dari hasil pembinaan tersebut mereka bisa hidup secara mandiri.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam bidang sosial dan bidang pelayanan serta pemberdayaan sosial, yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 97 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas sosial Kota Pekanbaru “Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, sesuai dengan peraturan walikota Dinas Sosial memiliki tugas pokok dalam bidang pembinaan, yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pembinaan teknis kesejahteraan sosial;

3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan, peningkatan keterampilan serta pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial, dan
4. Melaksanakan pengendalian, monitoring serta pemantauan kepada pengemis dan gelandangan yang telah dilatih dan di beri bantuan.

Khusus bidang yang melaksanakan upaya pembinaan pengemis dan gelandangan ini yaitu Bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas dan fungsi yaitu membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan rehabilitasi sosial, bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial
3. Koordinasi dalam pelaksanaan teknis pembinaan tuna sosial
4. Pelaksanaan koordinasi hasil pembinaan tunas sosial

Dari penjelasan diatas maka di ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembinaan tuna sosial termasuk kepada pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi sosial. Tentunya selama pelaksanaannya baik penertiban dan pembinaan telah berjalan dengan cukup baik, dan dalam kegiatannya banyaknya jumlah gelandangan urban dan tempatan yang terjaring dalam kegiatan razian dan penjaringan yang dilaksanakan menjadikan hal ini suatu fenomena. Berikut adalah jumlah data razia dan pembinaan pengemis dan gelandangan dari tahun 2017 hingga 2020:

Tabel I.1. Data Razia dan Pembinaan Pengemis dan Gelandangan Tahun 2017-2020.

No.	Tahun	Terjaring	Gelandangan Urban		Gepeng Tempatan	
			Gelandangan	Pengemis	Gelandangan	Pengemis
1.	2017	84	15	38	18	13
2.	2018	58	0	35	0	23
3.	2019	27	1	16	0	10
4.	2020	100	0	0	65	35
Jumlah		269	16	89	83	81

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Banyak Pengemis serta Gelandangan yang terjaring razia selama tiga tahun ini, terlihat dimana Gepeng di pulangkan ke daerah masing-masing sedangkan Penduduk tempatan di beri pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berikut ialah detail tindakan dan jumlah gepeng yang terjaring serta di pulangnya selama 2 tahun terakhir:

Tabel I.2. Jumlah Gepeng yang terjaring dan di pulangkan selama 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Terjaring	Jumlah yang dibina	Jumlah di pulangkan
1.	2017	84 orang	31	53 orang
2.	2018	58 orang	23	35 orang
3.	2019	27 orang	10	17 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Terlihat adanya penambahan dan berkurangnya jumlah pengemis serta gelandangan yang tertangkap saat razia dari kegiatan koordinasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Satpol PP dan pada 3 tahun terakhir. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan angka pengemis yang terjaring, dibina dan dipulangkan. Penurunan angka ini belum bisa diartikan bahwa banyaknya jumlah pengemis di Kota Pekanbaru menurun, tetapi angka penangkapannya yang menurun, maka dapat diasumsikan banyaknya pengemis yang belum terjaring. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial ialah membawa mereka pada shelter, LKSA atau panti sosial untuk dilakukan pembinaan agar mereka tidak lagi kembali ke jalan dan dapat hidup secara normal. Tetapi dari observasi yang dilakukan masih banyak pengemis dan gelandangan yang telah dibina masih kembali ke jalan untuk hidup sebagai gelandangan dan pengemis. Dari data yang didapatkan peneliti menemukan beberapa fenomena mengenai pembinaan pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Belum efektifnya pembinaan meliputi, pengarahan, pembimbingan dan peningkatan kemampuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan tujuan mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Hal ini dapat dilihat pada data yang didapatkan bahwa jumlah pengemis dari tahun ketahun semakin meningkat.
2. Masih banyak pengemis dan gelandangan yang terjaring razia oleh tim gabungan Kota Pekanbaru belum dapat mengikuti pembinaan oleh Dinas Sosial sehingga masih banyaknya pengemis dan gelandangan yang tertangkap dapat kembali lagi ke jalan.

3. Banyaknya pengemis dan gelandangan yang masih melakukan aksi meminta-minta dan memanfaatkan fasilitas umum untuk tempat tinggal seperti di persimpangan lampu merah, trotoar jalan, dan tempat seharusnya mereka tidak boleh ada disana dan melakukan aksi meminta-minta, dimana masalah ini tidak sesuai Perda No 12 Tahun 2008, sehingga menjadi tugas dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertibannya.
4. Belum maksimalnya pembinaan pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terlihat masih banyaknya Gepeng yang dibina oleh Dinas Sosial kembali lagi menjadi melakukan aksi hidup di jalanan mengemis dan menjadi gelandangan kembali.

Pentingnya pembinaan dari instansi pemerintah di daerah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dibidang sosial khususnya rehabilitasi pengemis dan gelandangan yang menjadi tugas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, khususnya meminimalkan jumlah pengemis dan gelandangan dan akan menimbulkan kesadaran bagi pengemis dan gelandangan dalam kehidupan kedepannya serta diharapkan timbulnya kemandirian dari mereka yang dibina menjadi tujuan utama pembinaan itu sendiri. Berdasarkan beberapa permasalahan dan fenomena yang terjadi, dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa fenomena dari pembinaan pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru sehingga peneliti ingin melakukan penelitian, dan merumuskan judul penelitian antara lain: **“Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai permasalahan pengemis dan gelandangan dan kurang efektifnya pembinaan pengemis dan gelandangan yang merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan penelitian antara lain: **“Bagaimanakah Peranan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru”**.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin di capai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Dinas Sosial dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan pengemis dan gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, data serta referensi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

2. Secara akademis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, data serta pedoman untuk penelitian dengan objek dan subjek pembahasan sejenis di masa yang akan datang.

3. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial Pekanbaru dalam optimalisasi pembinaan kepada pengemis dan gelandangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan beberapa teori untuk mendukung penelitian yang pertama ialah teori tentang pemerintah.

1. Teori Negara dan Tujuan Negara

Negara merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, Perancis dan Belanda yang mana semua kata tersebut berasal dari satu akar kata bahasa latin yaitu (status atau Statum) yang berarti memiliki sifat yang tetap dan tegak. Dimana jika diambil arti yang lebih luas dari kata tersebut maka berarti yaitu perkumpulan hidup manusia

Negara menurut (Azikin, 2008;35) merupakan suatu wilayah atau daerah dipermukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada diwilayah tersebut. Menurut Budiardjo (dalam Kusnardi, 2000;57) merupakan suatu daerah teritorial yang memiliki peraturan perundang-undangan (kontrol) yang di perintah oleh sejumlah pejabat negara dengan kekuasaan yang sah.

Cita-cita dan harapan yang ingin dicapai negara, kemudian fungsi dari suatu negara tersebut ialah upaya untuk menuju tujuan yang telah di tetapkan, seperti banyaknya negara yang mengidamkan kesejahteraan menyeluruh untuk

masyarakatnya mejadi kenyataan. Maka dari itu negara tanpa tujuan dan fungsi maka pembentukkannya akan menjadi sia-sia dan sebaliknya negara tanpa fungsi akan menjadikan negara tidak menentu. Menurut Muchlis (2003:65) sedikitnya negara harus memiliki fungsi antara lain:

1. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya
2. Menjaga pertahanan negara dari kemungkinan serangan dari luar negaranya
3. Membentuk dan menegakkan keadilan, melalui badan-badan pengadilan
4. Melaksanakan tindakan penertiban untuk mencegah terjadinya konflik, menjadi stabilisator ekonomi, sosial dan politik untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, menurut Yamin (dalam Kusnardi, 2000;77) terdapat 2 macam tujuan dibentuknya suatu negara meliputi nasional dan tujuan internasional. Tujuan nasional suatu negara antara lain:

1. Kebahagiaan dalam negara
2. Kemajuan kesejahteraan umum
3. Kecerdasan kehidupan negara

Sedangkan yang merupakan tujuan internasional ialah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan :

1. Kemerdekaan

2. Perdamaian
3. Keadilan sosial

Seluruh negara di seluruh dunia ini tentunya memiliki kemauan untuk membentuk suatu pemerintahan yang kokoh dan kuat. Dalam hal ini pemerintahan yang kuat tidak hanya diukur dari adanya kekuatan militer yang kuantitas dan kualitasnya memadai tetapi lebih kepada seberapa besar kontribusi masyarakatnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut. Hal ini dapat dihasilkan dari pelayanan yang baik dan prima yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut baik di tingkat pusat dan daerah maka akan terbentuk pemencaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat yang lebih rendah melalui cara desentralisasi yang optimal

Sebagaimana negara modern saat ini berkaitan dengan keinginan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama pemerintah sebagaimana cara yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan dan jenis pemerintahannya. Bentuk yang paling nyata antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya ialah pelayanan publik secara langsung. Hal ini berkaitan dengan sistem pemberian layanan kepada masyarakat secara menyeluruh adil dan jujur, kemudian pelayanann yang paling dasar dimiliki oleh suatu negara ialah rasa aman, sehingga rakyatnya dapat merasa aman di dalam negara dan jauh dari ancaman kedaulatan teritori.

2. Teori Pemerintah

Budiardjo (2003: 21) menjelaskan defenisi pemerintah adalah pelaksanaan tugas dengan terorganisasi yang berpedoman pada dasar negara yaitu kedaulatan dan kemerdekaan rakyat sebagai tujuan utamanya ialah ideologi negara itu sendiri.

Kemudian pemerintah dalam arti yang lebih luas menurut Pamudji (2005: 22) yaitu kewenangan pemerintah dalam memelihara keamanan dan kedamaian, ketentraman dan ketertiban negara keluar dan kedalam. Maka dari itu negara harus memiliki kekuatan militer dalam rangka mengendalikan angkatan perang.

Ndraha (dalam labolo, 2011: 34) menyatakan pemerintah ialah alat yang dimiliki negara yang terdiri dari lembaga-lembaga kenegaraan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Menurut ajaran Montesquieu (dalam Boediningsih, 2010; 1) pemerintah dalam defenisi yang secara luas yaitu pemerintah meliputi tiga kekuasaan, antara lain:

- a. Pembentukan Undang-undang
- b. Pelaksanaan
- c. Peradilan.

Sedangkan dalam arti sempit pemerintah adalah badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan yang memutuskan perundang-undangan, peradilan, dan kepolisian serta lain sebagainya. Kemudian menurut Dharma (2002: 32) Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan sah oleh rakyatnya untuk melaksanakan pengaturan terhadap kehidupan masyarakat interaksi dalam pergaulan masyarakat (baik pemerintah dengan pemerintah, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok serta sesama individu) dengan tujuan untuk memenuhi keprluan dan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga interaksi yang diatur tersebut berjalاندengan harmonis. Pemerintah secara umum menurut menurut Davay (dalam Wasistiono, 2006: 53) memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Pembuatan kebijakan

- b. Layanan publik
- c. Perwakilan rakyat
- d. Pembangunan
- e. Perencanaan dan koordinasi

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah merupakan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan utama di bentuknya pemerintahan yaitu adalah demi memelihara sistem ketertiban masyarakat, sehingga rakyatnya bisa menjalani kehidupan secara wajar.

3. Teori Pemerintahan

Ndraha (2003: 5-6) mendefenisikan pemeritah sebagai suatu organ negara yang memiliki kewenangan melakukan tahap-tahap pelayanan public serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh pelayanan publik bagi setiap masyarakat atau warga negara melalui hubungan antar pemerintahan dan publik, sehingga masyarakat secara umum dapat menerima dan menikmati pelayanan tersebut pada saat dibutuhkan dan diperlukan.

Sedangkan pemerintahan ialah suatu sistem yang memiliki tujuan melindungi dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang di perintahkan dengan memberikan layanan civil berupa jasa publik. Pemerintahan dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materilnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara. Munaf (2016:47)

Pemerintah menurut Montesquieu (dalam Setyawan, 2004: 33) merupakan suatu lembaga negara secara keseluruhan dikenal juga dengan nama Trias Politika baik itu eksekutif (melaksanakan peraturan perundang-undangan), kemudian

yudikatif (mengawasi pelaksanaan perarutan perundang-undangan) serta legislative (membuat undang-undang). Menurut Ndraha (2005: 69) istilah pemerintahan mengandung maksud yang hampir sama, antara lain:

1. Pemerintah merupakan semua organisasi dan badan yang memiliki tugas dan fungsi dalam memenuhi dan melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah adalah sebagai seluruh organ kekuasaan didalam negara yaitu Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan pelaksana tugas seluruh badan, lembaga dan pertugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara.

Lebih jelas Syafi'e (2007: 44-46) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teknik pemerintahan maka perlu diketahui beberapa teknik tersebut, antara lain:

a. Koordinasi.

koordinasi adalah sinkronisasi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat bersama dan tujuan bersama pula. Unsur inilah yang diperlukan untuk penyamaan persepsi mengenai tugas pemerintahan masing masing.

b. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kerja pemerintah atau pembangunan negara sseperti membayar pajak, menjaga ketentaman dan ketertibn lingkungan.

c. Desentralisasi

Penyerahan sebagian urusan kepada tingkat pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang mana untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

d. Dekonsentrasi

Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

e. Sentralisasi

Yaitu Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan.

f. Integrasi

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempengaruhi sikap warga negara dengan sedemikian rupa yang mana hasilnya masyarakat dapat mendukung keputusan mereka kepada organisasi daerah dan pusat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan ialah suatu sistem yang memiliki tujuan melindungi dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang di perintahkan dengan memberikan layanan civil berupa jasa publik dimana tujuannya ialah mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara indonesia didalam UUD.

3. Teori Ilmu Pemerintahan

Kata pemerintahan berakar dari kata pemerintah, dan yang paling sedikit kata “perintah“, kata perintah sendiri tersebut mempunyai beberapa unsur dalam

pembentukannya, unsur tersebut antara lain terdapat dua pihak, pihak yang memerintah memiliki kewenangan, kedua pihak memiliki hubungan dan saling berinteraksi dan mengharuskan ketaatan dari pihak yang diperintah kepada pihak yang memerintah.

Pemerintahan dapat dikatakan sebagai seni dan ilmu, dikatakan ilmu pengetahuan dikarenakan pemerintahan telah memenuhi syarat sebagai sebuah ilmu antara lain dapat diajarkan dan dipelajari, memiliki objek formal dan material, sifatnya universal, spesifik (khas) dan sistematis sedangkan dikatakan sebagai seni dikarenakan bahwa pemerintahan di pimpin oleh seseorang yang banyaknya tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang pemerintahan, tetapi mampu memerintah karena terdapat suatu faktor seperti kharismaniknya, maka dari itu dalam menjalankan roda pemerintahan seorang pimpinan dengan cara politiknya tidak perlu memiliki latar belakang pemerintahan tetapi harus mempelajari ilmu pemerintahan sebagai upaya memahami seluk-beluk disiplin ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan Menurut Ndraha (2003: 7) ialah ilmu yang mempelajari pemerintah sebagai unit kerja publik dalam melaksanakan perlindungan dan memenuhi tuntutan baik kebutuhan maupun harapan warga negara dengan melakukan layanan publik atau jasa civil khususnya dalam interaksi pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya Syafiie mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. Senada dengan hal itu Supriyanto (2009: 26) menjelaskan bahwa ilmu pemerintah sebagai ilmu yang

mempelajari mengenai tugas pemerintah dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Musanef (dalam Syafi'e 2011:8) adalah ilmu yang dapat digunakan untuk memimpin dan menguasai serta menyelidiki unsur dinamis khususnya berhubungan dengan interaksi dalam hubungan antar instansi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki kepentingan serta diwakilkan oleh instansi tersebut.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari disiplin ilmu khususnya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pelayanan, pemberdayaan, pembuatan kebijakan serta pembangunan serta interaksi atau hubungan antar pusat dan daerah serta antar instansi vertikal dan horizontal dalam suatu negara.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan public menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008: 6) sebagai suatu bentuk keputusan dengan bercirikan konsistensi dan repitisi mengenai tingkah laku mereka sebagai perumus, pembuat dan pengesahan keputusan tersebut yang mematuhi keputusan yang di tetapkan, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan public adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pendapat tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara apa yang harus di kerjakan oleh pemerintah dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat,

baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan kepentingan publik. (Indiahono, 2009: 19). Sehingga dari pengertian diatas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan dan menertibkan masalah yang ada pada masyarakat.

Kemudian lebih jelas menurut Indiahono (2009: 18) kebijakan publik adalah segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah publik/negara yang sedang dihadapi. Perumusan dan penetapan suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan publik, serta memenuhi penyelenggaraan dan kepentingan urusan public. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan publik ialah pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan cara melakukan aktivitas dan membuat keputusan secara bersama dan dilaksanakan oleh pemerintah demi menyelesaikan masalah internal maupun eksternal negara dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

5. Teori Peranan

Peranan menurut Soekanto (2002:243) ialah merupakan salah satu aspek dinamis dalam kedudukan (status) individu khususnya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dari itu ia menjalankan suatu peranan yang melekat padanya. Peranan juga merupakan perangkat harapan-harapan yang lekatkan pada seorang individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Maka dari itu dapat diketahui bahwa setiap individu pasti

memiliki peranan tersendiri sesuai dengan statusnya pada satu lingkungan baik itu lingkungan sosial dan organisasi.

Kedudukan atau status dari seseorang individu dalam suatu kelompok atau lingkungan yang memiliki hak dan kewajiban menjalankan suatu peranan yang diilikinya. Peranan merupakan apa yang dimiliki oleh individu atau suatu kelompok dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka peran ini harus dilaksanakan oleh seseorang yang memegang suatu peran atau jabatan dalam lingkungan, organisasi atau negara sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pada setiap individu tentunya memiliki peran masing-masing seperti memutuskan apa yang akan diperbuatnya untuk masyarakat dan kesepakatan-kesepakatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya.

Menurut Soekanto (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya Giroth (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) juga berpendapat hampir sama dengan Soekanto, bahwa “Peranan adalah merupakan sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagian tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam system sosial yang bersangkutan dan harapannya sendiri dari suatu jabatan yang di dudukinya dalam sistem sosial tersebut. Selanjutnya menurut Soekanto (2002:243) dalam peranan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Sesuatu yang dapat diperbuat oleh seseorang dalam lingkungan sosial maupun masyarakat.

- b. Ketentuan dan peraturan yang dapat dihubungkan dengan tempat atau posisi dari seseorang dalam lingkungan masyarakat.
- c. Merupakan perilaku seseorang yang dipandangan sangat berpengaruh untuk struktur masyarakatnya.

Sedangkan menurut Thoha (dalam Tangkilisan, 2005:266) Peranan adalah beberapa perilaku yang diharapkan dari individu, peranan semacam itu ialah norma yang dapat menjadikan seseorang mendapatkan peran pada lingkungan sosial dan lingkungan organisasinya. Khususnya pada ruang lingkup organisasi ialah semakin kita dapat memahami tepatnya keselarasan atau integrasi antara tujuan dan misi organisasi.

Menurut Ndraha (2003:53) peranan defenisikan merupakan perilaku seorang individu yang ditetapkan oleh pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. lebih jelas Soekanto (20013:216) pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu, sebagai berikut:

- 1) tidak seimbangya peluang atau kesempatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang mampu melaksanakan suatu peran yang dimilikinya.
- 2) Kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksananya memerlukan pengorbanan dalam arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 3) Individu yang dianggap mampu melaksanakan suatu tugas oleh masyarakat maka harus diberikan suatu peran yang jelas kepadanya.

- 4) Jika sistem lingkungan sosial ingin dipertahankan keberadaan dan eksistensinya maka peranan yang ada di masyarakat tertentu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari berbagai defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan suatu aspek sekumpulan fungsi yang dimiliki serta dilakukan oleh seseorang dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang tersebut dalam sistem sosialnya, maka dari itu diharapkan bagi yang bersangkutan dalam menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat sesuai dengan kedudukan dan perannya.

5. Teori Pembinaan

Secara umum kata pembinaan berasal dari kata “bina” yang memiliki arti mengarahkan, membimbing dan memberikan pengetahuan, pembinaan secara teoritis merupakan suatu proses yaitu pembaruan, tindakan, usaha dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien demi mencapai hasil dan kondisi yang lebih baik dari pada sebelumnya, Sementara itu Syadam (2000:408) mengatakan pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna memperoleh hasil yang baik, dalam hal ini pembinaan berarti suatu upaya untuk membuat terobosan-terobosan sebagai upaya mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pembinaan Menurut Efendi (2003:24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Kemudian pembinaan menurut Toha (2002: 7) adalah kondisi yang lebih baik dari proses tindakan yang dilakukan serta hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya peningkatan dan kemajuan dari evaluasi yang dinilai dan kemungkinan perkembangan dari hasil pembinaan tersebut. Terdapat dua unsur dari definisi tersebut yang pertama pembinaan merupakan suatu proses, tindakan yang memiliki tujuan kepada kondisi yang lebih baik, kedua pembinaan selalu mengarahkan pada tindakan perbaikan. Selanjutnya menurut Nawawi (2005:111) pembinaan itu dilakukan dengan:

1. Memberikan petunjuk penggunaan suatu metode, prosedur pelaksanaan, pemakaian alat, menyusun perencanaan, melakukan pencatatan serta pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
2. Menjelaskan dan memperbaiki suatu instansi pemerintah agar personil melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan cara kerja yang di arahkan dan menuju sasaran yang tepat.
3. Memberikan motivasi, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian, moral, pembinaan disiplin kerja, serta kesempatan kerja bagi personil dengan cara peningkatan tanggung jawab dan lain sebagainya.

Kemudian pembinaan juga dapat dilakukan dengan mengikutsertakan sekelompok orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan dengan upaya dan pikirannya yang didasarkan inisiatif dan kreatifitas mereka. Khususnya dalam mewujudkan terobosan dengan menggunakan metode yang tepat. Menurut Santoso (1995:52) Pembinaan merupakan upaya melatih, meningkatkan dan memelihara

kelompok maupun individu agar menjadi lebih baik lagi, Santoso mengungkapkan terdapat 4 indikator pembinaan, sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
2. Pemberian bimbingan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengajak, menuntun, mengiringi serta memotivasi supaya anggota organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal, serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai rencana.
3. Memberikan Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua yang diarahkan oleh pimpinan dapat terselesaikan menurut rencana yang telah ditetapkan dari arahan yang diberikan.
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah suatu upaya dan tindakan untuk meningkatkan pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan atau skill sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih baik dari pada sebelumnya.

Menurut Sumodiningrat (1999;72) pembinaan tidak dilakukan untuk selamanya melainkan harus dapat menimbulkan kemandirian, dalam hal ini melalui kegiatan pembinaan yaitu proses belajar maka diharapkan mereka dapat mencapai pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan status mandiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembinaan yang dilaksanakan tentunya memiliki tahap-tahap tertentu, antara lain, pertama, tahap kesadaran berfungsi untuk pembentukan perilaku sadar akan potensi diri, kedua, tahap transformasi yaitu pemberian pengetahuan, keterampilan dasar, ketiga, peningkatan kemampuan intelektual ialah

memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anggota untuk menimbulkan kemandirian individu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembinaan adalah perbaikan dan pembaharuan kepada kondisi suatu kelompok dengan melakukan pendidikan, pembinaan, pengarahan serta pelatihan sehingga kondisi dari kelompok tersebut khususnya pada beberapa aspek seperti sosial, budaya politik dan ekonomi dapat menuju kondisi yang lebih baik dari pada sebelumnya.

6. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan merupakan orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan normal hidup yang layak dan tidak memiliki tempat pekerjaan dan tinggal tetap, hidup secara mengembara dan berpindah-pindah serta menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat tinggal. Pengemis adalah orang yang penghasilannya didapatkan dengan cara meminta-minta kepada orang dimuka umum dengan mengharap belas kasihan dari orang dan berbagai alasan untuk dikasihani. sedangkan pengemis dan gelandangan menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial ialah orang yang hidup dengan cara mengemis dan menggelandang di muka umum. Gambaran umum mengenai gelandangan dan pengemis itu, antara lain:

1. Orang yang di asingkan dari khalayak ramai, atau lingkungan sosialnya,
2. Sekumpulan orang miskin atau dimiskinkan oleh lingkungan sosialnya,
3. Orang yang bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan dengan cara mencari uang seperti meminta-minta dan hidup secara menggelandang.

Muthalib dan Sudwarjo (dalam Iqbali, 2005:3)

Selanjutnya menurut sarwono (2005) pengemis dan gelandangan merupakan orang-orang dengan tingkat ekonomi yang dapat dikatakan miskin serta hidup di kota dan cenderung tidak mempunyai rumah maupun tempat tinggal tetap. Pengemis dan gelandangan ini cenderung menjadi beban bagi pemerintah kota dikarenakan mereka memanfaatkan sarana, prasana serta fasilitas publik perkotaan seperti halte bus, taman, jembatan penyeberangan sebagai tempat tinggal tetapi tidak membayar kembali fasilitas mereka nikmati itu (tidak membayar pajak), aspek masalah pengemis dan gelandangan bukan hanya masalah pajak secara teori diatas tetapi keberadaannya dapat menimbulkan ancaman ketertraman dan ketertiban di lingkungan khususnya di jalan raya, maka dari pada itu perlunya perhatian dari pemerintah daerah khususnya Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban dan pembinaan sehingga timbul kesadaran dari mereka untuk hidup yang lebih baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang pernah dilakukan dan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu juga sebagai pedoman dan bukti bahwa penelitian dengan pembahasan objek yang sama pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan objek dan subjek lokasi serta teori yang berbeda. Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel II. 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anrdrio Pratama Tahun 2015,	Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Indikator pembinaan mental dan pembinaan keterampilan	Teori Peranan menurut Soekanto (2001:268) Metode Kuantitatif
2.	Ronal Piska Tahun 2014, <i>skripsi ilmu pemerintahan</i>	Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Variabel Pembinaan	Teori Pembinaan Menurut Mifta Thoha (2008:207) Indikator berbeda Metode penelitian kuantitatif
3.	Irvam Ade Putra Tahun 2014, <i>Skripsi administrasi Negara, Universitas Riau</i>	Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru	Metode Kualitatif Variabel Pembinaan	Teori Pembinaan (Vertikal Rivai, 2004:148) Fenomenanya berbeda Kurangnya sanksi dan ketergasan pemerintah dalam menindak gelandangan dan banyaknya pengemis yang tidak mengikuti pembinaan setelah di razia.
4.	Fatmawati, Tahun 2017	Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung	Variabel Pembinaan	Teori Pembinaan Menurut Powerwadarmita (1987) Metode kuantitatif

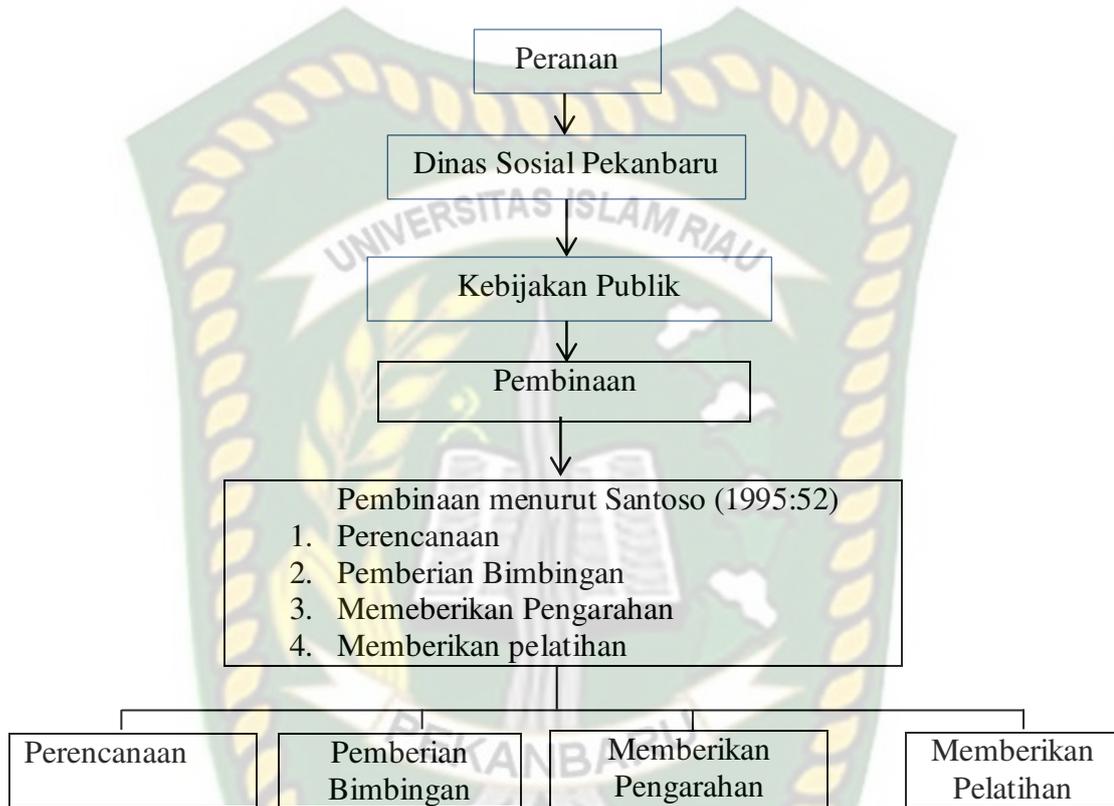
Sumber: Modifikasi Peneliti dari beberapa sumber jurnal, 2020

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fenomena dan masalah yang telah dijelaskan pada bab latar belakang dan teori yang digunakan dalam studi pustaka, maka selanjutnya dilakukan penggambaran mengenai alur pemikiran penulis mengenai masalah penelitian, teori yang digunakan dengan bentuk rangkaian dari tahap penelitian.

Maka untuk jelasnya mengenai kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Penelitian



Sumber: Modifikasi Penulis

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas teori dan konsep yang di gunakan pada penelitian ini maka konsep operasional dibutuhkan untuk menguraikan defenisi dari masing-masing konsep yang di operasionalkan. Maka dari itu pentingnya menjelaskan masing-masing konsep untuk di operasionalkan, hal ini juga berguna untuk meminimalkan kesalahpahaman arti dalam penelitian ini, untuk lebih jelas konsep operasional pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah dengan tujuan meningkatkan sikap, keterampilan, pengetahuan subjek atau peserta pembinaan dengan tindakan bimbingan, arahan, serta pelatihan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari pada sebelumnya.
3. Perencanaan dalam penelitian ini adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai dimasa yang akan datang serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, perencanaan dalam kegiatan pembinaan ialah kebijakan, program dan kegiatan yang di susun oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya dalam pembinaan gelandangan dan pengemis.
4. Pemberian bimbingan merupakan usaha yang di akukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengajak, mengiringi, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar gelandangan dan pengemis yang di bina dapat menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya.
5. Memberikan Pengarahan dalam penelitian ini adalah tindakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengupayakan agar semua yang diarahkan sesuai dengan tujuan dari pembinaan gelandangan dan pengemis dari yang memberikan pengarahan.
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini adalah pemberian pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan

pengemis dan gelandangan dengan tujuan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran serta menambah kemampuan dan keahlian mereka.

7. Pengemis dan gelandangan merupakan orang-orang dengan tingkat ekonomi tergolong rendah yang hidup di daerah perkotaan dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap sehingga mereka hidup secara mengelandang dan berpindah-pindah dan mencari uang dengan cara meminta-minta belas kasihan dari orang lain.

E. Operasionalisasi Variabel

Adapun penjabaran variabel-variabel Pembinaan tersebut kedalam Operasionalisasi Variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian

Konsep Operasional	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. Efendi (2003:24)	Pembinaan	1. Perencanaan	a. Penetapan Program b. Penetapan Kegiatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Pembimbingan	a. Memotivasi b. Memberikan pengetahuan	Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Pengarahan	a. Pemberian arahan b. Memberikan petunjuk	Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Pendidikan dan pelatihan	a. Pemberian pendidikan b. Pemberian pelatihan	Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Modifikasi Penulis dari berbagai sumber teoritis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini, dimana penulis ingin menggambarkan kondisi yang ditemui pada lokasi penelitian secara objektif sesuai dengan data yang didapatkan serta masalah pembinaan pengemis dan gelandangan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, menurut Prastowo (2011:181) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan cara mendekati objek penelitian. Pendekatan mengadakan penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap penting paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah berada di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai pelaksana pembinaan gelandangan dan pengemis karena penulis melihat adanya permasalahan atau indikasi kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, kemudian dibebberapa lokasi titik jalan dan persimpangan yang banyak terdapat gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

C. Key Informan dan Informan

Informan penelitian adalah sumber informasi yang di peroleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Menurut Suyanto (2005:172) terdapat beberapa macam Informan penelitian, antara lain:

1. Informan Kunci atau key informan ialah informan atau orang yang memiliki dan mengetahui informasi mengenai objek penelitian
2. Informan utama yaitu mereka yang melakukan interaksi serta terlibat langsung dengan objek penelitian.
3. Informan tambahan yaitu mereka yang memiliki informasi secara tidak langsung yang diperlukan untuk menambah data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi untuk mendapatkan keterangan mengenai pembinaan Pengemis dan Gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial
3. Pegawai
4. Pengemis
5. Gelandangan

Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pekerja sosial yang bisa di mintai wawancara dan paham tentang apa yang di teliti oleh peneliti. Kemudian untuk informan selanjutnya ialah gelandangan dan pengemis khususnya yang telah di bina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dari penjelasan mengenai informan diatas maka dapat diketahui bahwa pemilihan informan penelitian ini berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian yaitu pembinaan pengemis dan gelandangan oleh Dinas Sosial Pekanbaru.

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini penulis menentukan informan dan *key informan* berdasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key Informan*).

Dalam Pemilihan Informan dan key informan secara purposive ini memiliki tujuan agar informan yang dipilih itu merupakan orang yang paling mengetahui mengenai objek penelitian serta dapat memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini. *Key Informan* adalah mereka yang mengetahui dan mempunyai berbagai macam informasi yang penting yang dimana di perlukan dalam penelitian. maka peneliti menentukan *key informan* nya adalah Kepala Bidang Rehabilitasi, Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Pegawai Bidang Rehabilitasi karena mereka merupakan *stakholder* (pemangku kepentingan) yang berperan dan terhadap pembinaan pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru, kemudian pengemis dan gelandangan yang merupakan target pembinaan tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data, antara lain:

a. Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu melalui wawancara secara langsung, data primer dalam penelitian ini juga terkait hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan

pembinaan pengemis dan gelandangan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sehingga data primer dalam penelitian ini ialah perencanaan, pengarahan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan pengemis dan gelandangan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru.

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang telah ada sebelum dan dimasukkan dalam penelitian, data sekunder biasanya dalam bentuk dokumen kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan serta kebijakan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain data pengemis dan gelandangan yang pernah dibina, jumlah pengemis dan gelandangan yang terjaring razia dan jenis pembinaan yang dilakukan serta profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat berkontribusi makna dalam tertentu.

2. Observasi

Pengamatan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk dokumen ataupun tertulis, yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data tambahan karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk melakukan perbandingan dan analisa terhadap temuan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan hasil penelitian dari wawancara dan observasi dalam bentuk kalimat yang dapat menggambarkan objek penelitian secara rinci, kemudian data di analisis secara kualitatif dengan memilah, mengorganisasikan, mengolah, menemukan pola dan mengambil kesimpulan kemudian di deskripsikan pada hasil dan pembahasan penelitian dari data hasil penelitian yang didapatkan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dalam penelitian yang baik salah satunya ialah memiliki rincian waktu dan kegiatan yang jelas, sebagai acuan kegiatan apa saja yang dilakukan saat penyusunan, penelitian serta penganalisisan data sehingga dapat diketahui bahwa dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kegiatan dan lama kegiatan tersebut berlangsung. Untuk lebih jelas mengenai jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.I : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021 /bulan/Minggu																			
		Juli				Agustus				September				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP							■													
3	Revisi UP							■													
4	Rekomendasi penelitian											■									
5	Penelitian lapangan											■									
6	Analisis Data penelitian											■									
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian											■									
8	Konsultasi Skripsi															■					
9	Ujian Komprehensif Skripsi															■					
10	Revisi Skripsi																			■	
11	Pengadaan Skripsi																			■	■

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertikal sejarah panjang terbentuknya Dinas Sosial di Pekanbaru dimulai pada tahun pada tahun 1974 kemudian Pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar dengan Jawatan Sosial selanjutnya pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota, Setelah itu pada tahun 2001 Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula sebagai satu organisasi yang memiliki tugas dan fungsi khususnya di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Pembentukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru diawali dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru diganti menjadi Dinas Sosial Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 97 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas sosial Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di bidang Kesejahteraan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi:

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru;
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program di bidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru;
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru;
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial;
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan;
6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan; dan
9. Pengelolaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.

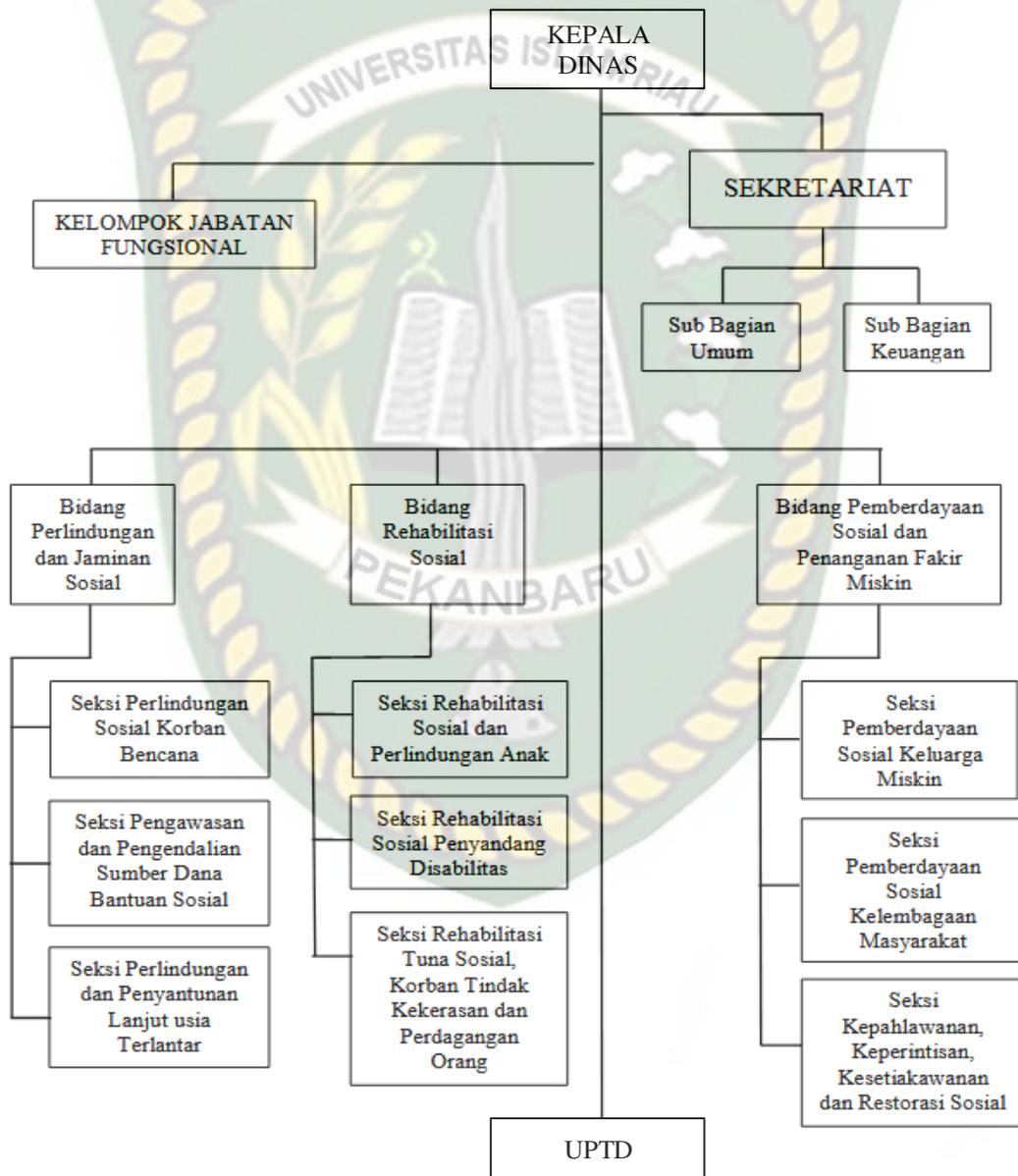
Sebagai suatu organisasi pemerintah maka instansi tentunya harus memiliki struktur dalam pembagian tugas dan fungsinya Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial
 - Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
 - Seksi rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagan Masyarakat;
 - Seksi Kepahlawanan, Keperitisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas sosial dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar. IV. 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

C. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkungan tugasnya;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru;

2. Perencanaan penyusunan perumusan dan pelaksanaan serta pengordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pengelolaan keuangan dan tata usaha aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
4. Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas upacara serta keprotokolan;
5. pengkoordinasian pembinaan perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban;
6. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri dari:

1. Sub Bagian umum
2. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perlindungan jaminan sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan penyiapan bahan, penyusunan rencana dan program perlindungan sosial bantuan jaminan sosial dan advokasi sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pembinaan pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam bencana sosial dan kerusakan masa;
3. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial;
4. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;
5. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan penyusunan laporan hasil hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas;
6. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis;
7. Pelaksanaan tugas kepada bawahan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
8. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas bidang;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial

3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.

4. Bidang Rehabilitasi sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan rehabilitasi sosial bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan penyiapan bahan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial;
3. Pelaksanaan koordinasi pembinaan Rehabilitasi Sosial;
4. Pelaksanaan pembinaan lanjut pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar
5. Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
6. pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar anak bermasalah dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak korban tindak kekerasan diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, korban dapat bekas hukuman dan tuna sosial kaum minoritas, eks penyandang psikotik;
7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perumusan dan penyusunan laporan hasil hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perumusan serta pemberian bentuk teknis;
9. Pelaksanaan tugas kepada bawahan;
10. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, perumusan, pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan rencana kegiatan di bidang tugasnya; dan

11. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan Kesejahteraan Sosial keluarga miskin lembaga-lembaga sosial dan pemberian penghargaan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
2. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial;
3. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial

4. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di bidang tugasnya;
5. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perumusan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial;
6. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perumusan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan laporan dan hasil-hasil yang dicapai pelaksanaan tugasnya; dan
8. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin terdiri dari:

1. Seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin
2. seksi pemberdayaan sosial ke lembaga masyarakat
3. Seksi perlawanan Perintis kesetiakawanan dan restorasi sosial

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Setelah melakukan penelitian mengenai pembinaan pengemis dan gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi serta observasi secara langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru membina pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru. Pada tahapan awal akan di jelaskan mengenai identitas informan penelitian yang terdiri dari pendidikan, umur dan jenis kelamin. Identitas informan memiliki manfaat untuk menggambarkan kondisi atau keadaan informan penelitian melalui beberapa informasi yang diperlukan untuk melihat kualifikasi atau pembagian informan penelitian menurut kategori tertentu untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini.

Identitas informan dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai informan dalam hal ini terdiri dari Pegawai Dinas Sosial Kota, pengemis dan gelandangan yang mendapatkan pembinaan, sebab dengan menguraikan identitas informan yang menjadi subjek penelitian ini maka akan dapat diketahui tingkat pendidikan dan jenis kelamin serta umur informan dalam penelitian ini dari semua itu akan diketahui bahwa informan penelitian dalam kategori apa. Oleh karena itu identitas informan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin.

Dalam pelaksanaan penelitian ini ditetapkan sebanyak 10 informan, oleh karena itulah akan disajikan deskripsi identitas informan, yang terdiri dari umur, pendidikan dan jenis kelamin yang berguna untuk mengetahui kondisi informan secara umum untuk yang pertama akan diuraikan identitas reponden penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V.1. Distribusi informan penelitian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah informan	Persentase
1	Laki-Laki	7	80%
2	Perempuan	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa informan penelitian yaitu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 8 orang informan dengan presentase 80% dan informan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau 20%. Pada kategori ini bukan untuk membedakan saja tetapi untuk melihat bagaimana persebaran informan penelitian. Kemudian distribusi informan berdasarkan Umur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V. 2. Distribusi informan penelitian Berdasarkan Umur

No	Umur	Informan	Persentase
1	≤ 30 tahun	2	20%
2	30 - 39 tahun	4	40%
3	40 - 49 tahun	4	40%
4	≥ 50 tahun	-	-
jumlah		10	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa informan penelitian yang paling banyak pada umur antara 40- 49 tahun 4 orang informan atau 40%, kemudian ≤ 30 tahun

yaitu 2 Orang atau 20%, selanjutnya 30 – 39 tahun yaitu 4 informan atau dengan presentase 40%, kemudian tidak ada informan pada rentang umur > 50 tahun. Kemudian distribusi informan penelitian berdasarkan tingkat pendidikan, maka untuk jelasnya pada tabel berikut ini:

Tabel V. 3. Distribusi informan penelitian berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah informan	Persentase
1	Sekolah Dasar	3	30%
2	SMP	2	20%
3	SMA	1	10%
4	Diploma	-	-
5	Sarjana	4	40%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Penelitian, 20120

Dapat diketahui tingkat pendidikan informan penelitian didominasi pada tingkatan Sarjana yaitu pegawai Dinas Sosial berjumlah 4 orang atau 40% dan tingkatan SMP yaitu informan pengemis dan gelandangan 2 orang informan atau 20% setengah dari jumlah informan keseluruhan. Setelah mendeskripsikan informan penelitian melalui beberapa klasifikasi maka setelah itu dan selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian dibawah ini.

B. Hasil Penelitian

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah dengan tujuan meningkatkan sikap, keterampilan, pengetahuan subjek atau peserta pembinaan dengan tindakan bimbingan, arahan, serta pelatihan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari pada sebelumnya. Pemerintah memiliki fungsi bagaimana kondisi masyarakat dapat sejahtera baik dari sisi sosial maupun

ekonomi baik masyarakat secara umum dan tuna sosial secara khususnya, dalam hal ini tugas pemerintah di daerah ialah memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada tuna sosial yang mana termasuk gelandangan dan pengemis agar mereka dapat hidup lebih pantas dan lebih baik kedepannya.

Permasalahan kesejahteraan sosial mengenai pengemis dan gelandangan ini sering terjadi perkotaan besar, seperti Pekanbaru yang mana dari data yang di dapatkan semakin tahun angkat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis semakin meningkat baik lokal maupun pendatang. Maka dari itu pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan masalah sosial di Kota Pekanbaru sebagai tindakan preventif mencegah dengan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat dan kepada gelandangan dan pengemis dan respresif dengan melakukan penertiban pemulangan kedaerah asal serta melakukan pembinaan baik fisik, mental, kesehatan dan juga kemampuan mereka untuk mencapai hidup yang labih baik. Maka dari itu Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial sangat berperan dalam pembinaan pengemis dan gelandangan. Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan menganalisis maka dapat disajikan hasil penelitian pada sub bab di bawah ini:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dari setiap kegiatan, perencanaan merupakan proses menentukan apa yang ingin di capai dimasa yang akan datang serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, baik pemerintah pusat maupun daerah setiap pelaksanaan suatu kegiatan dibutuhkan rencana, karena dalam suatu rencana terkandung pedoman pelaksanaan program

dan kegiatan serta tujuan dari kegiatan tersebut. Bentuk dari perencanaan yang biasanya di susun oleh pemerintah daerah maupun instansi pemerintah ialah dalam bentuk rencana strategis dan kebijakan pelaksanaan program. Begitu pula perencanaan dalam kegiatan pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Perencanaan dalam tentunya harus memiliki tujuan biasanya dirumuskan dalam bentuk kebijakan dari masing-masing program yang nantinya akan dilaksanakan. Perencanaan secara umumnya dapat berbentuk kebijakan, strategi, program serta kegiatan. Demikianlah semestinya dengan kebijakan yang ada dalam perda tersebut, dalam kebijakan ketertiban sosial yang ditetapkan menjadikan kepada instansi pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kesejahteraan sosial seperti ketunaan dalam sosial, termasuk pengemis dan gelandangan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bustami selaku kepala bidang Rehabilitasi Sosial:

“Perencanaan yang kami lakukan pertama dengan melakukan identifikasi data dan penyandang tuna sosial, dari situ nanti akan merumuskan dan melaksanakan penertiban penyiapan pembinaan, bagi penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis)”. (wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 2 program pokok dalam bidang rehabilitasi sosial tuna sosial (gelandangan dan pengemis) selain melakukan persiapan dalam bentuk pencegahan dan penindakan juga melakukan persiapan data-data yang diperlukan untuk melakukan jenis pembinaan yang sesuai dengan karakteristik tuna sosial seperti jenis kelamin, umur dan latar belakang pendidikan, begitu juga dijelaskan oleh Bapak Riko Eka Putra

selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang:

“Perencanaan yang kami buat tentu ada sesuai dengan data-data tahun lalu, ada dua program yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan, pertama melihat data gelandangan dan pengemis beberapa tahun belakangan dan mempersiapkan kegiatan pembinaan bagi mereka yang terjaring”. (Wawancara pada Rabu 2 Desember 2020)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya pada bidang rehabilitas sosial memiliki dua program yang mengkhususkan pada penanganan, pembinaan pengemis dan gelandangan, melalui analisis data yang dilakukan kemudian merumuskan kegiatan penindakan bersama dengan instansi terkait kemudian melakukan pembinaan kepada pengemis dan gelandangan, bagitu juga tanggapan mengenai perencanaan dari pegawai pada seksi rehabilitasi sosial Bapak Herman dan Dani Harto :

“Program untuk rehabilitasi sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam kegiatan pembinaan ada dua, tetapi kegiatan yang dilakukan lebih dari itu”. (Selasa 1 Desember 2020)

“Dari segi perencanaan mengikuti rensra karena memang harus di analisis dulu kondisi di lapangan dan melihat tindakan apa yang cocok untuk pembinaan gelandangan dan pengemis ini”. (Selasa 1 Desember 2020)

Instansi pemerintah yang berperan dalam hal penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, yakni Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitas sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki dasar hukum yaitu Perda tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. Program utama yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru antara lain:

- Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi data dan penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis).

- Melaksanakan kegiatan penertiban dan pencegahan serta bekerjasama dengan pihak instansi terkait dalam pencegahan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif serta melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis).

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan dalam perencanaan yang dirumuskan dan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pencegahan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif serta melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (pengemis dan gelandangan) Dengan bentuk kegiatan dan layanan, antara lain:

1. Permakanan (7 hari)
2. Sandang
3. Alat bantu
4. Perbekalan kesehatan
5. Bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial
6. Bimsos kepada keluarga dan masyarakat
7. Fasilitasi pembuatan NIK, Akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
8. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
9. Penelusuran keluarga dareunifikasi atau reintegrasi sosial.

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui terdapat 9 kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru termasuk pada bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial. Kemudian hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui pencegahan keberadaan pengemis dan gelandangan pada lokasi seperti lampu merah, persimpangan dan tempat lainnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengendara di jalan raya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan

informasi serta himbauan, seperti leaflet, media massa, spanduk dan papan reklame dan juga kepada pengguna jalan raya.

Suatu perencanaan dalam bentuk kebijakan dan program dibuat tentunya menginginkan suatu perubahan terhadap permasalahan yang akan diatasi, seperti halnya program mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, didalam perencanaan dan program yang di ketahui bahwa memiliki 2 program utama yaitu pembinaan gelandangan dan pengemis dengan tujuan menghasilkan perubahan kehidupan bagi mereka yang diinginkan dari hasil akhir pembinaan ini secara jangka panjang adalah berkurangnya jumlah pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga mereka tidak lagi hidup sebagai gelandangan dan pengemis lagi.

Maka dari hasil penelitian mengenai perencanaan dapat ketahui secara konsep dan peraturan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah membuat perencanaan rancangan pelayanan sosial khususnya pembinaan gelandangan dan pengemis kemudian perencanaan mengenai pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah tersusun dengan baik.

2. Pemberian bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial Pekanbaru untuk mengajak serta mendorong agar gelandangan dan pengemis dapat menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya. Dalam pemberian bimbingan ini dilakukan secara persuasif agar gelandangan dan pengemis tidak merasa di paksa untuk pembetulan karakter dan perilakunya. Bimbingan berguna untuk memberikan ajakan kepada

gelandangan dan pengemis untuk merubah perilaku dan pola pikir kearah yang lebih maju serta perubahan karakter, cara pandang dan cara hidup kedepannya. Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Bustami selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai pemberian bimbingan:

“Pemberian bimbingan dilakukan dengan cara yang mengajak atau persuasif, jadi tidak dipaksakan, yang pasti kita bimbing mereka menuju perilaku dan pola pikir yang lebih baik lagi”.(wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa program pembinaan khususnya bimbingan sosial kepada gelandangan dan pengemis tersebut berupa program pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir dengan tujuan pembentukan karakteristik dan watak yang lebih baik dan maju. Pembimbingan dilakukan dengan cara mengajak perilaku kearah yang lebih baik kemudian dengan mengarahkan kepada perilaku dan pola pikir lebih maju, hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Riko Eka Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial:

Tentu ada bimbingan yang kami lakukan, tetapi lebih kepada pembentukan sikap dan perilaku serta pola pikir, memang kebanyakan gelandangan dan pengemis yang di bina sudah cukup dewasa tetapi tetap bimbingan ini perlu dilakukan agar dapat merubah midset mereka. (wawancara pada Rabu 2 Desember 2020)

Bimbingan diarahkan kepada hasil perilaku dan pola pikir gelandangan dan pengemis yang dibina menjadi lebih matang dan baik, dan di tujukan kepada kondisi kehidupan mereka baik sosial maupun ekonomi yang lebih baik juga. Tahap pembimbingan yang dilakukan dengan mengubah perilaku malas dari para gelandangan dan pengemis kemudian pola pikir untuk tidak merasa nyaman hidup di jalanan dan juga merasa bahwa menjadi gelandangan atau pengemis dapat

menghasilkan keuntungan secara cepat. Hal tersebut juga di jelaskan oleh pegawai Bidang Rehabilitasi sosial Bapak Herman dan Dani Harto, sebagai berikut:

“Kalau bimbingan lebih di fokuskan pada perubahan sikap dan perilaku serta pola pikir yang juga kita bekerjasama dengan beberapa ahli bimbingan konseling dan psikologi”. (Wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

“Bimbingan yang dilakukan dengan cara yang mengajak agar perubahan sikap dan perilaku untuk tidak hidup sebagai gelandangan dan tidak melakukan kegiatan mengemis kembali”. (wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Diketahui bahwa bahwa bimbingan dilakukan kepada pengemis dan gelandangan sebanyak 1-3 kali dalam setahun, yang dimulai pada awal tahun, pertengahan tahun, dan pada bulan Ramadhan karena banyaknya gelandangan dan pengemis pada saat bulan Ramadhan. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan sosial kepada pengemis dan gelandangan agar mereka dapat merubah perilaku dan pola hidup serta pemikiran mereka kearah yang lebih baik dan dapat kembali kedalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui hasil observasi ditemukan bahwa masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang memiliki keinginan dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan. Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari idividu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan. Berikut tanggapan Bapak Usman Eai dan Ibu Rina Marlina sebagai gelandangan yang telah dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru:

“seingat saya ada bimbingan tentang perilaku dan cara hidup yang lebih baik, Cuma ya teman-teman banyak yang kembali ke jalanan. (wawancara pada Kamis 3 Desember 2020)

“waktu itu ada bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial waktu kami di bawa ke tempat panti sosial, ada bimbingan tentang perilaku dan perubahan pola pikir”. (wawancara pada Kamis 3 Desember 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa memang ada dilakukan bimbingan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, kegiatan pembimbingan ini dilakukan setelah razia dan penertiban serta penangkapan gelandangan dan pengemis dilakukan di dalam panti atau shelter untuk sementara. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan bekerjasama dengan pihak lainnya seperti ahli bimbingan konseling dan psikologi untuk melakukan pembimbingan dengan cara membuat kelas sendiri dengan tujuan perbaikan sikap dan perilaku bagi anak yang bermasalah agar dapat hidup secara wajar, banyaknya dilakukan kepada remaja. Begitu juga tanggapan mengenai pemberian bimbingan dari Bapak Taufik dan Bapak Jusri sebagai gelandangan dan pengemis yang telah dibina oleh Dinas Sosial:

“Ada bimbingan waktu kami di bawa ke panti sosial waktu ada razia dengan Satpol PP”. (Wawancara pada Jumat 4 Desember 2020)

“Memang ada bimbingan dari Dinas Sosial dan satpol PP kalau tidak salah mengenai perilaku dan lingkungan sosial”. (Wawancara pada Jumat 4 Desember 2020)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengemis dan gelandangan yang pernah dibina menyatakan bahwa penyelenggaraan bimbingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Satpol PP dilakukan pada panti sosial, shelter, LKSA (lembaga kemasyarakatan Sosial) yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Pekanbaru, lokasi pelaksanaan tergantung pada kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Alizar dan Ibu Wit selaku Pengemis yang pernah di bina oleh Dinas Sosial:

“Ada pemberian bimbingan, pertama kami di bawa ke panti sosial kemudian baru ke shelter untuk kegiatan, tetapi ada juga teman kami yang tidak di bawa kesana melainkan di pulangkan. Kalau saya lebih suka seperti ini (mengemis)”. (Wawancara dengan pada Sabtu 5 Desember 2020)

“Bimbingan ada tentang perilaku dan keseharian setelah nanti keluar dari sana, tapi ya mau bagaimana biar kita udah di bina tetapi masih susah untuk usaha sendiri lebih enak di jalan seperti ini ada dapat uang setiap hari”. (Wawancara pada Sabtu 5 Desember 2020)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembimbingan dalam rangkaian program pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam peraturan dan ketentuan tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang memiliki keinginan dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan. Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari individu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan, maka dari hasil penelitian mengenai bimbingan secara keseluruhan diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial telah melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yaitu pembimbingan sosial dengan cukup baik.

3. Memberikan Pengarahan

Memberikan pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan dan membimbing orang dan sekelompok orang agar semua yang diarahkan mencapai sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis dalam

rangka program pembinaan. Pemberian pengarahan ini berupa nasehat untuk mengarahkan hidup mereka untuk lebih mandiri lagi dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial sekitar sehingga dapat membaaur dan meningkatkan potensi diri mereka dengan optimal kedepannya. Hal tersebut juga di benarkan oleh Bapak Bustami selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui wawancara yang dilakukan:

“Pengarahan yang dilakukan dengan cara langsung memberikan nasehat dan penjelasan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat supaya mereka dapat lebih memahami dan menjalankan kehidupannya dengan baik setelah dilakukan pembinaan tersebut. (Wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Selain dari pengarahan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat pengemis juga di berikan pengarahan mengenai peraturan di jalan raya, kemudian tata tertib lalu lintas maka di harapkan para pengemis dan gelandangan tidak lagi berkeliaran di jalan raya dan melakukan aktivitas meminta-minta disana, hal ini disebabkan keberadaan gelandangan dan pengemis di jalanan sangat mengganggu keamanan, kenyamanan serta ketertiban lalu lintas. Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Riko Eka Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang:

“Ada pengarahan mengenai tata cara kehidupan di masyarakat, kemudian tentang peraturan di jalan raya, kami juga bekerjasama dengan Satpol PP atau Polisi dalam hal ini”. (Wawancara pada Rabu 2 Desember 2020)

Dari wawancara di atas di ketahui bahwa pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bukan hanya pada tata cara kehidupan yang baik di masyarakat melainkan tata tertib dan aturan yang berlaku di jalan raya, agar mereka mengetahui bahwa kegiatan mengemis sangat dilarang di lakukan di jalan raya,

kemudian kegiatan gelandangan yang menggunakan fasilitas umum untuk kegiatannya seperti tidur dan meminta-minta sangat tidak di benarkan. Informasi serupa juga di jelaskan oleh Bapak Herman dan Dani Harto selaku pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Pengaruhannya ada dilakukan mengenai bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik, kemudian ada juga dilakukan pengarahan mengenai ketertiban di jalan raya oleh Satpol PP dan Polisi”. (wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Ada pengarahan yang diberikan dalam bentuk nasehat mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat supaya mereka dapat lebih memahami dan menjalankan kehidupannya dengan baik. (wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Dari wawancara yang dilakukan pada pegawai bidang Rehabilitasi sosial diketahui bahwa pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah berupa peparahan mengenai norma sosial kehidupan, agama dan juga pengarahan untuk tidak hidup secara mengelandang dan melakukan pengemisian serta tidak kembali tinggal di jalanan. Pengarahan yang dilakukan secara persuasif atau mengajak secara baik kepada pengemis dan gelandangan yang dibina.

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengarahaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru antara lain dilakukan saat adanya razia, dengan mengumpulkan gelandangan dan pengemis lalu di berikan pengarahan dan saat pembinaan di shelter atau panti sosial. Tetapi dapat diketahui bahwa masih banyak gelandangan dan pengemis binaan Dinas Sosial yang telah di berikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan masih kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Hal serupa mengenai pengarahan juga di jelaskan oleh Bapak Usman Eai dan Ibu Rina Marlina sebagai gelandangan yang pernah dibina oleh Dinas Sosial

“Pengarahan ada dilakukan waktu sebelum peminanpun ada, waktu di panti sosial pengarahannya bagaimana norma sosial dan nanti waktu selesai pembinaan”. (Wawancara pada Kamis 3 Desember 2020)

“Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial beberapa kali ada waktu di jalan kemudian waktu di panti sosial, ada pengarahannya tentang menjalani kehidupan yang lebih baik, kemudian ada juga dilakukan pengarahan mengenai ketertiban di jalan raya oleh Satpol PP”. (wawancara pada Kamis 3 Desember 2020)

Dari hasil wawancara dengan gelandangan dan pengemis yang pernah dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru diketahui bahwa pengarahan yang dilakukan Dinas Sosial bersama dengan instansi lain seperti Satpol PP ialah berfokus kepada nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, kemudian ketertiban di jalan raya bagaimana untuk membaur kembali kedalam masyarakat dan menjadi bagian dalam masyarakat dilingkungan mereka agar mereka dapat diterima oleh masyarakat sekitar sebagai warga. Senada yang diungkapkan oleh Bapak Taufik dan Bapak Jusri sebagai gelandangan yang pernah dibina oleh Dinas Sosial, sebagai berikut:

“Seingat saya pengarahannya tetang menjalani kehidupan yang lebih baik dan harus mematuhi normal sosial di lingkungan dan di Jalan raya kemudian untuk tidak kembali menjadi gelandangan. (wawancara pada Jumat 4 Desember 2020)

“Memang ada pengarahan dari Dinas Sosial dan satpol PP tidak kembali menjadi gelandangan”. (wawancara pada Jumat 4 Desember 2020)

Dari Wawancara di atas maka di ketahui pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP juga menekankan kepada mereka untuk tidak kembali ke jalan raya dan hidup mengelandang serta mengemis karena dapat mengganggu ketertiban sosial dan lalu lintas. Pengarahan juga tidak hanya saat pembinaan di shelter atau di panti tetapi secara langsung saat adanya sosialisasi kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia, hal tersebut merupakan tindakan

preventif dan peringatan bagi pengemis. Begitu juga tanggapan dari Bapak Alzar dan Ibu Wit sebagai pengemis yang telah dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru:

“Ada pengarahan, waktu sebelum di bina pun ada, terkadang pihak dinas sosial datang kelokasi sini mengarahkan untuk tidak di jalan lagi nanti akan di razia”. (Wawancara pada Sabtu 5 Desember 2020)

“Sering pengarahan, sebelum dan waktu pembinaan ada juga, ya tentang bagaimana kami kedepannya nanti, kemudian untuk tidak hidup di jalanan lagi”. (wawancara pada Sabtu 5 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemberian nasehat dan penjelasan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat, menjalani kehidupan yang lebih baik dan harus mematuhi normal sosial di lingkungan dan di Jalan raya kemudian untuk tidak kembali menjadi gelandangan, maka dapat diketahui bentuk pengarahan yang di lakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru lebih bersifat persuasif atau mengajak gelandangan dan pengemis menjadi lebih sadar bahwa hidup di jalan dan melakukan tindakan mengemis secara hukum tidak dibolehkan kemudian melanggar normal-norma sosial serta pelanggaran di jalan raya dan dapat membahayakan jiwa mereka karena kondisi di jalan itu untuk sehari-hari tidaklah sehat.

Tetapi dapat diketahui bahwa masih banyak gelandangan dan pengemis binaan Dinas Sosial yang telah di berikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan masih kembali menjadi gelandangan dan pengemis, hal ini tentu harus menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan pengarahan dengan metode, materi dan narasumber yang lebih tepat sehingga akan menimbulkan kesadaran dari pihak gelandangan dan pengemis. Maka dri hasil penelitian mengenai pengarahan setelah melakukan wawancara dan observasi dapat diketahui

secara umum pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik.

4. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan pemberian pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan kepada seseorang atau kelompok orang dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada gelandangan dan pengemis yang di razia. Dalam menangani gelandangan dan pengemis dibidang pendidikan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan pendidikan yang merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan gelandangan dan pengemis kedepannya.

Seperti diketahui masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang tingkat pendidikannya rendah dan kurang mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal, hal inilah yang menjadi peran Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pendidikan gelandangan dan pengemis, dalam melakukan pembinaan pendidikan kepada gelandangan dan pengemis Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, seperti yang di jelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Bustami Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan:

“Pendidikan sangat penting bagi kita, baik yang terjaring itu orang dewasa atau anak kecil tetap kita berikan pendidikan dasar sesuai dengan tingkatan umur mereka yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pekanbaru, mengadakan kelas-kelas informal”. (Wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Dari hasil wawancara dapat diketahui salah satu Program penting yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu dengan melaksanakan program pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada

gelandangan dan pengemis yang terjaring sebelum mereka di kembalikan kepada lokasi tempat tinggal masing-masing, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berperan penting dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada gelandangan dan pengemis, yang mana salah satu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan memberikan beasiswa kepada gelandangan dan pengemis dengan rentang umur pendidikan SD sampai SMA yang telah di data oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan beasiswa atau pendidikan gratis. Hal tersebut juga di utarakan oleh Bapak Riko Eka Putra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, sebagai berikut:

“Pembinaan pendidikan ada untuk anak-anak yang mengemis nantinya akan bekerjasama dengan dinas pendidikan bisa diberikan beasiswa, kemudian ada juga pelatihan yang dilakukan meliputi salon, tata rias, dan menjahit keterampilan perbengkelan sepeda motor, dan las tetapi belum dapat dilakukan pada semua yang terjaring karena tempat dan pengajar yang terbatas”. (wawancara pada Rabu 2 Desember 2020)

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pendataan, berapa banyak gelandangan dan pengemis dengan umur wajib sekolah khususnya terhambat masalah faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu dan cenderung tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya. Maka salah satu bentuk pembinaannya ialah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan beasiswa dan pendidikan gratis terhadap gelandangan dan pengemis rentang umur wajib sekolah.

Dalam melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis pada umur remaja hingga dewasa, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan program pembinaan keterampilan terhadap gelandangan dan pengemis yang nantinya akan

di tempatkan pada panti sosial yang di kelolah oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan keterampilan gelandangan dan pengemis yaitu program pelatihan keterampilan diantara lain keterampilan salon, tata rias, dan menjahit untuk anak terlantar perempuan, sedangkan keterampilan perbengkelan sepeda motor, dan las untuk anak laki-laki. Hal tersebut di tegaskan oleh hasil wawancara dengan Bapak Herman dan Deni Harto selaku pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial

“Ada kegiatan pendidikan kalau masih usia sekolah, kemudian untuk yang sudah remaja atau dewasa di berikan pendidikan sesuai dengan umur dan pelatihan sesuai minat”. (Wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

“Pendidikan dan pelatihan ada dilakukan di panti sosial yang kami sediakan, pendidikan khususnya untuk anak usia sekolah sedangkan pelatihan keterampilan untuk yang sudah remaja atau dewasa, ada keterampilan mekanik, las, salon, tata boga dan tata rias”. (Wawancara pada Selasa 1 Desember 2020)

Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa program pembinaan keterampilan dilakukan oleh pihak ketiga dengan berkoordinasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Panti Sosial dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dimana gelandangan dan pengemis yang di razia kemudian di data kembali oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru selanjutnya, akan di berikan keterampilan sesuai keinginan dari pilihan yang diberikan oleh Dinas Sosial, pelatihan di lakukan oleh para pembina dari Panti Sosial.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa Keterampilan yang diberikan antara lain, pelatihan tata rias, menjahit, salon dan tata boga untuk gelandangan dan pengemis perempuan sedangkan untuk gelandangan dan pengemis laki-laki diberikan pelatihan berupa teknik las dan mekanik atau

perbengkelan sepeda motor. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Usman Eai dan Ibu Rina Marlina sebagai Gelandangan yang telah dibina oleh Dinas Sosial:

“Ada pelatihan yang dilakukan kalau saya waktu itu kendaraan bermotor”. (Wawancara pada Kamis 3 Desember 2020)

“Pelatihan yang saya terima menjahit”. (Wawancara pada Kamis 3 Desember 2020)

Dari wawancara tersebut seperti diketahui bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu pelatihan mekanik, las, salon, tata boga dan tata rias dan mereka bebas untuk memiliki jenis pelatihan sesuai dengan minat mereka. Pendapat yang sama juga di berikan oleh Bapak Taufik dan Bapak Jufri yaitu gelandangan dan pengemis yang telah di bina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

“Kalau saya pelatihannya pengelasan, sampai sekarang saya kerja di tempat las”. (Wawancara pada Jumat 4 Desember 2020)

“Kalau pendidikan ya ada Dinas pendidikan yang datang untuk anak-anak tapi pelatihan saya jadi mekanik motor”. (Wawancara pada Jumat 4 Desember 2020)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa pelatihan dan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial antara lain pengelasan dan mekanik motor, pendidikan di berikan untuk meningkatkan pengetahuan umum baik bagi anak-anak, remaja dan juga dewasa kemudian setelah dilakukannya pendidikan tahap akhir ialah melakukan pelatihan dengan tujuan untuk peningkatan keterampilan bagi pengemis dan gelandangan, yang mana diharapkan hasil pelatihan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka, tetapi pendapat berbeda di berikan oleh informan Bapak Alizar dan Ibu Wit sebagai Pengemis yang pernah dibina oleh Dinas Sosial, menyatakan:

“Pelatihan waktu itu saya las, tetapi setelah di bina saya tidak bekerja atau buka usaha, karena modalnya cukup banyak, sedangkan dana yang diberikan hanya cukup buat makan, jadinya ya ngemis lagi saya”. (Wawancara pada Sabtu 5 Desember 2020)

“Pelatihan waktu itu ada, menjahit, ada juga diberikan bantuan mesin jahit, tetapi sulit juga mencari pelanggan makanya saya kembali lagi kejalan”. (Wawancara pada Sabtu 5 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa masih adanya pengemis yang telah diberikan pembinaan melalui pengarahan, bimbingan pendidikan dan pelatihan tetapi masih kembali menjadi pengemis dan gelandangan, hal ini tentu menjadikan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial menjadi sia-sia. Tetapi dari keterangan pihak gelandangan dan pengemis, ada yang menyalurkan hasil pelatihan dan ada juga yang kembali kejalan, dikarenakan sulitnya membuka usaha sendiri dan tidak ingin bekerja dengan orang lain atau tidak memiliki keinginan dan adanya ketidakpercayaan diri dari pengemis dan gelandangan. Dalam hal ini harusnya pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dapat menyalurkan dan menempatkan gelandangan dan pegemis yang telah untuk bekerja di tempat yang memiliki atau membutuhkan pekerja sehingga mereka dapat langsung bekerja setelah pembinaan yang dilakukan.

Maka dapat diketahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta bekerjasama tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya hal ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan sesuai dengan peraturan serta visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka dapat diketahui dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sudah berjalan dengan cukup baik.

Seperti banyaknya teori penyebab keberadaan gelandangan dan pengemis disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, keluarga, kemiskinan, budaya, kemalasan, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Sehingga permasalahan ini menjadi sangat kompleks. Dampak yang dapat dihasilkan dari meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis dapat berakibat pada terganggunya ketertiban lalu lintas, ketidaknyamanan warga, tindak kriminal, keamanan dan kebersihan Kota Pekanbaru.

Usaha Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis kemudian bentuk lainnya memberikan brosur tentang perda ketertiban sosial dan leaflet. Tindakan represif yaitu melakukan razia kepada gelandangan dan pengemis kemudian bagi yang terjaring maka akan dilakukan pembinaan untuk memberikan mereka bekal agar dapat bergabung lagi dengan komunitas sosial di lingkungan tempat tinggal dan memiliki kemampuan di suatu bidang dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi mereka sendiri atau dapat bekerja pada orang lain sebagai upaya mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya sasaran ini akan menciptakan kondisi kehidupan mereka yang lebih sejahtera daripada sebelumnya.

Beberapa tahap dalam melakukan pembinaan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang pertama, dengan adanya perencanaan program pembinaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan gelandangan dan pengemis, bimbingan untuk perubahan sikap dan perilaku, pengarahan kepada kehidupan yang lebih baik kedepannya dan pelatihan dan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam rangka pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan. Maka di harapkan dari pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan di dapatkan manfaat kepada kondisi Kota Pekanbaru yaitu terciptanya keadaan yang aman dan tertib bagi masyarakat sekitar dan kondisi masyarakat dari sisi ekonomi menjadi lebih baik, kemudian manfaat yang diterima oleh pengemis dan gelandangan ialah mendapatkan pembinaan untuk merubah kebiasaa, perilaku, pola pikir dan peningkatan kemampuan dan keahlian semi merubah kondisi kehidupan mereka menjadi kondisi yang lebih baik.

Fungsi primer pemerintah yaitu pelayanan, penetapan kebijakan, pembangunan dan pemberdayaan. Pelayanan dapat dilakukan dalam bidang apapun seperti administrasi dan pembangunan sarana dan prasana, kemudian pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kondisinya dan diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kondisi setelah dilakukan pemberdayaan. Maka dalam bidang sosial pelayanan dan pemberdayaan yang merupakan fungsi utama yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penanganan dan pembinaan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) dalam bentuk pembinaan, pengarahan dan pelatihan keterampilan, maka diharapkan dari pembinaan tersebut mereka yang telah diberikan pembinaan pendidikan, keahlian serta bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk dapat bergabung kembali

kedalam masyarakat dan meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka mejadi lebih baik. Kemudian Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap pengemis dan gelandangan diharapkan bisa merubah pola pikir mereka untuk tidak lagi menjadi pengemis dan gelandangan lagi.

B. Faktor Penghambat Pembinaan Pengemis dan Gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah melakukan penelitian mengenai peranan Dinas Sosial Pekanbaru dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat diketahui beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Kurangnya anggaran sebagai sumber dana dalam pelaksanaan Program pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga dalam pelaksanaannya hanya beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan hanya beberapa pengemis dan gelandangan yang dibina dalam satu kurun waktu pembinaan selainya dibebaskan dan dipulangkan kedaerah asal.
2. Sumber daya pelaksana pembinaan seperti kurangnya jumlah sumber daya pembinaan yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga masih memerlukan bantuan dari Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Polisi serta pihak ketiga dari swasta yang akan menambah anggaran.
3. Masih kurangnya kesadaran dari gelandangan dan pengemis yang telah di bina sehingga kembali lagi melakukan aksi meminta-minta dan hidup sebagai gelandangan kembali.

4. Tidak adanya kerjasama dan mitra dari pihak swasta yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Pekanbaru dalam menampung dan menyalurkan pengemis dan gelandangan yang telah dibina agar mendapatkan pekerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka dapat di simpulkan dari masing-masing indikator, antara lain:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu melakukan pendataan ulang gelandangan dan pengemis kemudian melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait, bimbingan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis.
2. Pembimbingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Satpol PP di lakukan pada panti sosial, shelter, LKSA (lembaga kemasyarakatan Sosial) yang merupakan mitra Dina Sosial Kota Pekanbaru.
3. Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah berupa pegasarahan mengenai norma sosial kehidupan, agama dan juga pengarahan untuk tidak hidup secara mengelandang dan melakukan pengemisan serta tidak kembali tinggal di jalanan, dan yang
4. pelatihan dan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial antara lain pengelasan dan mekanik motor, pendidikan di berikan untuk meningkatkan pengetahuan umum baik bagi anak-anak, remaja dan juga dewasa kemudian setelah dilakukannya pendidikan tahap akhir ialah melakukan pelatihan dengan tujuan untuk peningkatan keterampilan bagi pengemis dan gelandangan.

Setelah melakukan penelitian mengenai Pembinaan Pengemis dan Gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka dapat diketahui bahwa pembinaan yang meliputi perencanaan, pembimbingan, pengarahan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk mendukung pembinaan gelandangan dan pengemis oleh dinas Sosial Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dapat menganggarkan kembali atas Kurangnya anggaran program pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga dapat menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan yang lebih beragam dan dapat memulangkan gelandangan dan pengemis lebih banyak kedaerah asalnya.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menambah Sumber daya pelaksana pembinaan dari segi jumlah untuk dapat mensukseskan program pembinaan gelandangan dan pengemis juga memanfaatkan bantuan Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Polisi.
3. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dapat melakukan penerarahan dan pembimbingan lebih intensif dan terarah kepada gelandangan dan pengemis yang akan di bina sehingga mereka tidak kembali lagi melakukan aksi meminta-minta dan hidup sebagai gelandangan kembali.
4. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat dalam menampung dan

menyalurkan potensi yang dimiliki oleh pengemis dan gelandangan yang telah dibina agar mendapatkan pekerjaan dan tidak kembali lagi kejalanan.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hasyimozem Yusnani, Iwan Setiawan, Ade arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah

2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT Raja Grafindo Perkasa

Kansil dan Christine 2002. *Pemerintah Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi*

Daerah. Jakarta, Sinar Grafika

Kamil, Mustofa 2012. *Model Pendidikan Dan Pelatihan Bandung*, CV Alfabet

Kertonegoro, Sentanoe, 1994, *Manajemen Organisasi*, Jakarta, Widya Press

Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori,*

Konsep, dan Pengembanganya, Jakarta, Grafindo

Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada

Manullang, M. 1992. *Dasar-dasar Manajaemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Maulidiah, Sri 2014. *Pelayanan Publik*, Bandung, CV. Indra Prahasta

Moekijat. 1989. *Kamus Administrasi Kepegawaian Indonesia*, Bandung, Munadar

Maju

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT.

Remaja Rosdakarya Offset

Mortimer, R Feinberg, 1996. *Psikologis Manajemen*, Jakarta, PT. Mitra Utama

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada

Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta

Ndraha, Talziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakrta, PT.

Rineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Sebuah Rekrontuksi Ilmu Pemerintahan*

Jakarta, PT. Rineka Cipta

Poerwadarminta, W.J..S. 1995. *Kamus Umum Rahasia Indonesia*, Jakarta, PT.

Balai Pustaka

Putra, Nusa. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung, PT.

Remaja Rosdakarya Offset

Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*,

Pekanbaru, Zanafa Publisng

Santoso Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*,

Yogyakarta, Refika Aditama

Suparlan, Parsudi. 1993, *Kemiskinan Diperkotaan*. Jakarta, Yayasan Obor

Indonesia

Suproyogo, I dan Tabrani. 2001. *Metode penelitisn kualitatif*. Bandung PT.

Remsjs Rosdakarya

Syafiie, Kencana, Inu. 2009, *Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Syafiie, Kencana, Inu. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka

Cipta

Syafiie, Kencana, Inu. 2014, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

Wahyuni, Sri, 2013. *Perencanaan Pembelajaran Bahasa Berkarakter*, Bandung

PT. Refika Aditama

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Pearuturann Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban

Sosial

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Lingkungan Kota Pekanbaru

Peraturan Darah Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi,

Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di

Daerah Provinsi

